

RENCANA KERJA TAHUN 2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)
KABUPATEN BARRU
Jalan H. A. Iskandar Unru Nomor 2 Kabupaten Barru 90712



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Perikanan;
 - m. Dinas Kesehatan;
 - n. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
 - s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - w. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - x. Badan Pendapatan Daerah;
 - y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - bb. Kecamatan Barru;
 - cc. Kecamatan Tanete Rilau;
 - dd. Kecamatan Tanete Riaja;
 - ee. Kecamatan Pujananting;
 - ff. Kecamatan Balusu;
 - gg. Kecamatan Soppeng Riaja; dan
 - hh. Kecamatan Mallusetasi.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 31 Agustus 2025
BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 31 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 63 NOMOR 61



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 420/BAPPELITBANGDA/XII/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARRU,

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Ketua

1. Membimbing Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
3. Melaporkan hasil kerja tim baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.

B. Sekretaris

1. Menghimpun dan menginventaris penyelenggaraan administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
3. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

C. Kelompok Kerja

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Membantu pelaksanaan tugas ketua dan sekretaris dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026; dan

3. Melaksanakan tugas administrasi lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 5 Desember 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru, di Barru;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR: 420/BAPPELITBANGDA/XII/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026**

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

I. Sekretariat Daerah

Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Barru

Sekretaris Tim : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barru

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Barru
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barru
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Barru
4. Sarmiati Burhanuddin, SH, M.Pd. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Kesra)
5. H. Syahriadi, S.Hi. MA Bag. Kesra Setda Barru (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Kesra)
6. Ahmad, S. Ag Bag. Kesra Setda Barru (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Kesra)
7. Saaduddin H.Wahid, S.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Organisasi)
8. Fadli Darmis, S.Si (Perencana Ahli Pertama Bag. Organisasi)
9. Nur'asmi. B, S.Sos (Staf Bag. Organisasi)
10. Dewi Susanti (Staf Bag. Pemerintahan)
11. Ariyani Arifin, A.Md (Staf Bag. Kesejahteraan Rakyat)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Barru
2. Kepala Bagian Hukum Setda Barru
3. Isma Kurniaty Muslimin, SH. MH (Penyuluh Hukum Ahli Muda Bag. Hukum)
4. Andi Roswati Daeng Sanga, SH. M.A.P (Analisis Hukum Ahli Muda Bag. Hukum)

5. Muddatsir Hasan, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bag. Hukum)
6. Anni Sari, ST, M.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)
7. Rahman Judriah, ST. M.Eng (Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)
8. Alamsyah Rahim (Staf Bag. Hukum Setda Barru)
9. Andi Khaerana Riyu, A. Md (Staf Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barru
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Barru
3. Hj. Sri Musfirah, S. Pt Bag. Perekonomian dan SDA (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Perekonomian dan SDA)
4. Sitti Aminah Tang, S.Sos, M.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Perekonomian dan SDA)
5. Hamka, S.IP (Staf Bag. Perekonomian dan SDA)
6. Andi Marwati (Staf Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
7. Hendrayani (Staf Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Barru
2. Kepala Bagian Umum Setda Barru
3. Gunawan Wibisono, S.Kom., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Adm. Pembangunan Setda Barru)
4. Bhisma Setya Laksana A, SM., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Adm. Pembangunan Setda Barru)
5. Haeriah, S.M.,M.M. (Kasubag. Keuangan Bag. Umum)
6. Mirwan, S.Sos.,M.M. (Kasubag. Rumah Tangga Bag. Umum)
7. Rapika, S.M. MM (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah, Staf Ali Dan Kepegawaian Bag. Umum)
8. Wahyuddin L. , S.Sos (Staf Bag. Umum Setda Barru)

II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ketua Tim : Sekretaris DPRD

Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Rio Darmawan, S.E (Analisis Perencanaan Ahli Muda)

3. Andi Majjajareng, S.Sos (Analisis Kinerja)
 4. Syamsuriani, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
- B. Telaahan Kebijakan
1. Farid Muhiddin, S.E (Analisis Keuangan Pusat Ahli Muda)
 2. Suriani, S.Sos (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)
 3. Andi Fadli Hasan, S.E (Analisis Keuangan)
 4. Herry Hermawan (Pengurus Barang)
- C. Tujuan dan Sasaran
1. Abdu Haris, S.Sos, M.M, (Perisalah Legislatif Ahli Muda)
 2. Nurliah, S.H, M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
 3. Nurlinda, S.Sos (Penyusun Risalah)
 4. Amir Page (Pengadministrasi Umum)
- D. Rencana Kerja
1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 2. Kepala Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran
 3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
 4. Muhammad Syihabuddin, S.E (Analisis Keuangan)

III. Inspektorat

Ketua Tim : Inspektur Inspektorat

Sekretaris Tim : Sekretaris Inspektorat

Kelompok Kerja :

- A. Evaluasi Kinerja
1. Inspektur Pembantu Wilayah I
 2. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, Analisis, dan Evaluasi Inspektorat
 3. Amirulbahar (Auditor Ahli Pertama)
 4. Amrah (Auditor Ahli Pertama)
- B. Telaahan Kebijakan
1. Inspektur Pembantu Wilayah II
 2. Nur Ardhi Tahir, SE (Auditor Ahli Pertama)
 3. Asma Jafar, SH (Auditor Ahli Pertama)
 4. Dzulfitri, SE (Auditor Ahli Pertama)
- C. Tujuan dan Sasaran
1. Inspektur Pembantu Wilayah III
 2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat
 3. Mentari Chendrakasih Putri Mantong (Auditor Ahli Pertama)

4. Ikhsan Sugiarto Hasrun (Auditor Ahli Pertama)

D. Rencana Kerja

1. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat
3. Herman Usman, ST (PPUPD Madya)
4. Lirzam Zalmar, ST (PPUPD Pertama)

IV. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua Tim : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Galih Wijayanto, S.M. (Analisis Keuangan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kompetensi
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kompetensi
2. Kepala Bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

V. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Gunawam Parenrengi D., ST (Fungsional Perencana)
3. Musmualim, S.Sos (Bendahara)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Fitrisandi, S.Kom (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Kepala Subbagian Keuangan
3. Akhiruddin Kadir, SE (Fungsional Perencana)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Kepala Subbagian Program
3. Nimah Z. Hamid, S.Sos (Pengelola Program dan Kegiatan)

VI. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Ketua Tim : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Kepala Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
3. Kepala Subbidang Akuntansi Aset
4. Kepala Subbagian Keuangan

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Aset Daerah
2. Kepala Subbidang Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan
3. Kepala Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
4. Ida Farida, SE (Fungsional Analisis Kebijakan)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Perbendaharaan Daerah
2. Kepala Subbidang Perbendaharaan
3. Kepala Subbidang Kas Daerah
4. Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia
5. Rosmijati, SE (Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah)
6. Sitti Rahma, SE.,M.Si (Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Perencanaan Anggran Daerah
2. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran
3. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Analisis Anggaran
4. Kepala Subbagian Penyusunan Program
5. Harianto (Pelaksana Pengadministrasi Perencana dan Program)

VII. Badan Pendapatan Daerah

Ketua Tim : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Subbid Penagihan, Keberatan dan Penindakan Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Subbid Sarana dan Prasarana Benda Berharga Badan Pendapatan Daerah
4. Nurul Haq Arma Putra (Fungsional)
5. Muhammad Sopyan (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Subbid Hukum dan Perundang-Undangan Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Subbid Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
4. Yunita Wulan Apriyanti, S.Tr.IP (Analisis Data dan Informasi)
5. Ida Mega Rachmawaty (Pengadministrasi Umum)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Subbid Perhitungan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah
4. Andi Abdul Hakim, SE (Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah)
5. Andi Yunitasari, S.STP (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah)
6. Alimbachri, S.Sos (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Pendapatan Daerah
3. Rahmat (Bendahara Pengeluaran)
4. Adam Malik Karim, SE (Bendahara Gaji)
5. Hasma Usman (Bendahara Penerima)

VIII. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketua Tim : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Barru
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Rijaluddin, ST (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. M.Nachrun, ST (Analisis Bencana Ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Barru
2. Kepala Subbagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Rahma, SKM (Analisis Bencana Ahli Muda)

IX. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ketua Tim : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Asniwali Syam, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama
2. Dahlan A, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Hj. Nurdiah (Pengelola Gaji)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Hj. Mardawati, S.Sos, M.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Amir (Bendahara Pengeluaran)

D. Rencana Kerja

1. Kasubag Program, Anggaran dan Keuangan
2. Hadijah, S.Sos (Pengelola BMD)
3. Andri Shacarouf, S.Kom (Pranata Komputer)

X. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua Tim : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Kasubag Keuangan
3. Akhyar

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang GTK
2. Kepala Seksi GTK Pendidikan Dasar
3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang PAUD dan PNF
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana
3. Ibrahim, S.Sos (JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda)

D. Rencana Kerja

1. Kasubag Program
2. Munasiah Salam, S.Pd
3. Mukhtar, S.Sos

XI. Dinas Kesehatan

Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Kesehatan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Kesehatan
3. Agus Pammu, SKM (Fungsional Epidemiologi)
4. Ervina Septiami AR, SKM, M.KM (Fungsional Sanitarian)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Nurul Fajeriah, SKM, M.Tr.Adm.Kes (Fungsional Administrator Kesehatan)
3. Nuramalyah, SKM, M.Kes (Fungsional Tenaga PKIP)
4. Astuti Amirullah, SKM (Fungsional Epidemiologi)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan
2. Emmy Mustafa, SKM, M.Adm.Kes (Fungsional Administrator Kesehatan)
3. Hajerah, SKM (Fungsional Tenaga PKIP)
4. Nurlina, SKM (Fungsional Epidemiologi)

D. Rencana Kerja

1. Kasubag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
2. Adiatman, M.Kep, Sp.Kep.K (Pengelola Program dan Kegiatan)
3. Sukmawati, SKM (Fungsional Administrator Kesehatan)
4. Sukmawaty, S.Si, Apt, M.Tr.Adm.Kes (Fungsional Apoteker)

XII. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ketua Tim : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Suhaerul, ST, MT (JF Penata Ruang Ahli Muda)
4. Jafar, ST (JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda)
5. Safirah Syihab, ST, MM (JF Penata Ruang Ahli Muda)
6. Sahrir, ST (Pemeriksa Irigasi)
7. Sudirman Usman, S.Sos (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan SDM
3. Hasriah Halide, ST, MT (JF Teknik Pengairan Ahli Muda)
4. Andi Tenriuleng, ST, MM (JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
5. Masudi, ST (JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda)
6. Dewi Sartika, ST, M.A.P (JF Penata Ruang Ahli Muda)
7. Syamsidar, S.T (Pengelola Jasa Konstruksi)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Bina Marga
2. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Maslinah, ST, MT (JF Teknik Pengairan Ahli Muda)
4. Amsar HS, S.Sos (Analisis Reklamasi)
5. Rangga Birawa Jayasakti, SP.W.K (Analisis Tata Ruang)
6. Imam Firmansyah, ST (Analisis Perumahan)
7. Fhellindha Agusthiany Frans, S.T (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
2. Kepala Sub Bagian Program

3. Faisal, ST, MT (JF Teknik Pengairan Ahli Muda)
4. Suparman, ST (Pengawas Bangunan dan Gedung)
5. Roswita Dewi, ST (Analisis Jalan dan Jembatan)
6. Helnasiata, ST (Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman)
7. Ahmad B. Jamaluddin, ST (Analisis Perumahan)
8. Firman Ahmad, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)

XIII. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ketua Tim : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sekretaris Tim : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Trantib
2. Kepala Bidang Penegakan Perda
3. Kepala Subbagian Umum dan SDM

B. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3. Syamsurijal, S.Sos. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

XIV. Dinas Sosial

Ketua Tim : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Mukarramah, S,IP (Pekerja Sosial Ahli Muda)
3. Nahda, S.Sos (Pekerja Sosial Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Tisa Ayu Riana, S.Psi (Pekerja Sosial Ahli Muda)
3. Firmansyah (Pengelola Kesejahteraan Sosial)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Risma Rahaju, SKM,M.Kes (Pekerja Sosial Ahli Muda)
3. Annihaya Rauf, S.Sos (Penyuluh Sosial Ahli Muda)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Ilyas Ali,SE (Analisis Keuangan)
4. Astuti, S. Sos (Bendahara)

XV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ketua Tim : Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
2. Kepala Subbagian Keuangan
3. Ina Mualiah, SE (Fungsional Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
4. Zaenaruddin, S.IP (Analisis Institusi Masyarakat pedesaan)
5. Nasrullah, SE (Fungsional Swadaya Masyarakat Ahli Pertama)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Hj. Adriana, SE. M. Pd (Fungsional Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
4. Ashbiyah, S.Sos (Fungsional Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
5. Abdul Karim, S.Sos (Fungsional Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kamariah, S. Sos (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Adriani Ramli, AMG (Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB)
4. Hijratul Muaswin. A, S.ST (Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB)
5. Muhammad Hanaping, S.Sos (Pengadministrasi Keuangan)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Kepala Subbagian Program
3. Kepala UPTD PPA
4. Sriyanti Syahrir, SE (Pengawas Perempuan dan Anak)
5. Anastasia Rante Sapan (Pengadministrasi Keuangan)

XVI. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Ketua Tim : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan SDM
3. Rosmini, S.TP. (Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda)
4. Andi Sahriani, S.P., M. Si (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda)
5. Suriani, S, Pt., M. Si (Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda)
6. Nur Rahmah, S.P., M.P. (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda)
7. Nurlinda, SE (Analisis Keuangan)

B. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Sub Bagian Program
7. Kurniyati Lukman, S.P. (Fungsional Perencana Ahli Pertama)

XVII. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Ketua Tim : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kasubag Penyusunan Program
2. Kasubag Keuangan
3. Kasubag Umum

B. Telaah Kebijakan

1. Haris Amrullah, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Irpan, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Hj. Nur Alam (Adyatama Ahli Muda)

4. Andi Rospayani Paweloi, S.Pi. (Adyatama Ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Vandy Eka Atmaja, S.E. (Perencana Ahli Pertama)
2. Nurhidayat, S.S. (Pengelola Informasi Kepariwisata)
3. Ashar Ashari Azis, S.Pd (Analisis Keolahragaan)
4. Muh. Sabir, S.E. (Analisis Keuangan)
5. Umi Kalsum, S.Par. (Adyatama Ahli Pertama)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Kepemudaan
2. Kepala Bidang Olahraga
3. Kepala Bidang Pariwisata
4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

XVIII. Dinas Lingkungan Hidup

Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Lingkungan Hidup
3. Gunawan, S.Sos (Analisis Kinerja)
4. Nurhayati, ST.,M.Si (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
2. Muh. Dahlan. S.Sos (Pengawas Lingkungan Hidup)
3. Akhmad Ali, SP (Pengendali Dampak Lingkungan)
4. Pratiwi Puji Lestari, ST (Analisis Lingkungan Hidup)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH Dinas Lingkungan Hidup.
2. Akhmad Yani, SP. M.Si (Penelaah Dokumen Lingkungan)
3. Marwah, S.SP (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
4. Samsumardin (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
2. Artina Nur (Analisis Keuangan)

3. Fahmi T (Pengelola Barang dan Aset Daerah)
4. Kartini S (Pengelola Gaji)

XIX. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ketua Tim : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Nurul Hilal Bahnar, S.IP. M.Si (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Santy Alimuddin, S. Kom. MM (Pranata Komputer Ahli Muda)
3. Nur Fadillah Kaharuddin S. Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Hj. Jumiati, S. Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Jamal Basri, A. Md. Kom (Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian)
4. Haidir, Amd. Kom (Operator SIAK Terampil)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Nur Alam Marwah (Analisis Keuangan)
3. Titin Sumarni, S. Sos (Bendahara)
4. Nurdiana, S. Sos (Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan)

XX. Dinas Perikanan

Ketua Tim : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barru

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Barru

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayaan Kecil, Usaha Kecil dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan SDM
3. Hendra, S.Pi (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)
4. Arifuddin, S.Pi (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)

5. Supratman, S.Pi (Analisis Pengelolaan Sumber Daya)
 6. Rahmawati, A.Md.Pi (Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap)
- B. Telaahan Kebijakan
1. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 2. Al'Amin, S.Pi, M.Si (Analisis Akuakultur Ahli Muda)
 3. Marwan Edy, S.Pi (Pengawas Perikanan Ahli Muda)
 4. Awaluddin Darwis, S.Kel (Analisis Standarisasi Budidaya)
 5. Asriani (Analisis Budidaya Perikanan)
 6. Jaeni S.Pi (Analisis Kinerja)
 7. Siti Kuryanita Putri Permata, H. S.Pi (Pembina mutu hasil kelautan dan Perikanan ahli peretama)
- C. Tujuan dan Sasaran
1. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 2. A.Pusva Yulyana, S.Pi (Pengawas Perikanan Ahli Muda)
 3. Dahrifuddin, S.Pi (Analisis Pasar hasil Perikanan Ahli Muda)
 4. Arniati, S.Pi (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda)
 5. Salman, S.Kel (Analisis Mutu Hasil Perikanan)
 6. Rahmawati Idrus, A.Md.Pi (Pengawas Perikanan terampil)
 7. Muhdar, S.Pi (Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama)
- D. Rencana Kerja
1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Herianty, S.Pi (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)
 3. Miftah Sudirman, S.Pi (Bendahara Pengeluaran)
 4. Wahyudi, S.Pi (Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan)
 5. Sitti Rukiah, S.Pi (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama)
 6. Isma Afrilia, S.Pi (Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama)

XXI. Dinas Perhubungan

Ketua Tim : Kepala Dinas Perhubungan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Perhubungan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
2. Kasubag Umum dan SDM
3. Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek
4. Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
5. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Annisa Putri Nur, ST
7. Musliha
8. Rahman Bin Tamrin
9. Samsul Bahri, A.Md
10. Nurlaela, A.Md
11. Muhammad Idris
12. Syainal Syahdan

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Lalu Lintas
2. Kepala Seksi Manajemen Lalulintas Jalan
3. Kepala Seksi Rekayasa Lalulintas dan Penerangan Jalan Umum
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Saharuddin, S.Sos
6. Jamaluddin
7. Asdar, SM

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Prasarana , Pengembangan dan Keselamatan
2. Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan
3. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Dharma Agus
6. Imran Sutar
7. Irwan Anas

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Ferry Garongkong
3. Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran
4. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Ferry Garongkong
6. Ahmad Adil Jaya
7. Jumadil
8. Fahyuddin, A.Md
9. Sarkiah
10. Ma'ruf, A.Ma. PKB
11. Kartini
12. Ashar

XXII. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketua Tim : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Nurming, S.Sos (Kepala Subbagian Umum dan SDM)
3. Abdi Setiawan, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Amrullah Hasan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Zulkifli, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda)
3. Hj. Faisah, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Sasmita (Pengadministrasian Sarana Dan Prasarana pada Sub Bagian Umum dan SDM)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Indra, SE., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Gusti Ayu Anugrah, S.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Ade Vitrayanti B, SM (Pengawas Penanaman Modal)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Huspira S,S.Sos (Kepala Subbagian Program)
3. Zulkifli, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda)
4. Hj. Faisah, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

XXIII. Dinas Tenaga Kerja

Ketua Tim : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Kerja, Penempatan Kerja dan Transmigrasi
2. Iskandar, ST., M.Si (Fungsional Pengantar Kerja)
3. Syafruddin, SE (Fungsional Pengantar Kerja)
4. Diah Rezki Pardani, S.Sos (Analisis Tenaga Kerja)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Arfiah, SH (Mediator Hubungan Industrial)
3. Amirullah, SH (Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Subbagian Umum dan SDM
2. Asri Rahayu Anas, A.Md (Pengelolaan Pemanfaatan BMD)
3. Masykur (Pengadministrasi Umum)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Ruslinawati, A.Md (Pengelola Gaji)
3. Rismayanti (Pengadministrasi Keuangan)

XXIV. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Ketua Tim : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Distribusi Bahan Pokok, Penting Dan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3. Herawati, S.E. (Penyuluh Perindustrian Dan Pedagangan Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2. Muhyar Sabir, S.E., M.M (Fungsional Pengawas Koperasi)
3. Yusuf Albahtimi, S.E. (Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Sarana Distribusi Dan Pelaku Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2. Andi Wikra Sanjaya Djamruk, S.H. (Analisis Perdagangan Ahli Muda)
3. Akisman, S.E. . (Analisis Perdagangan Ahli Muda)

D. Rencana Kerja

1. Kepala UPTD Metrologi Legal
2. Kepala Subbagian Program Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3. Hasni Sofian, S.Sos (Fungsional Analisis Perdagangan)
4. Fachrul Zulfikar Dahri, S.T. (Analisis Koperasi)

XXV. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Ketua Tim : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Jemma, S.Kom (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda)
4. Asri Asik, ST,M.I.Kom (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Marjani Zainal Abidin, SH (Fungsional Pranata Humas Ahli Muda)
3. Syamsuriati, S. Sos (Fungsional Pranata Humas Ahli Muda)
4. Aswar (Pengelola Gaji)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Syaribulan, S.Pi, M,Si (Analisis Data Statistik)
4. Harniati, S.Si (Statistisi Ahli Pertama)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Subbagian Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Akbar Arafah, ST (Fungsional Sandiman Ahli Muda)
4. Hasmiyah, S. Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)

XXVI. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Ketua Tim : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Halwiana Laewa, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Madya)
3. Rosdiana Ismail, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
4. Suskati, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
5. Asriani, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
6. Suharpan. K (Pengadministrasi Umum Bidang Perpustakaan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Marawiah, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Madya)
2. Samsinar, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
3. Hj. Khaeriah, SE, M.M (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
4. Pertiwi Hardiknas Putri, SE, M. A.P (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
5. Fitrayana Taufik, A. Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Subbagian Umum dan SDM)
6. Mila Karmila, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Pertama)
7. Carles (Pengadministrasi Umum Subbagian Umum dan SDM)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Hj. Sitti Hamrina, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
3. Dra. Hj. Nurbaya (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
4. Adnawiah, S.I.Pust (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
5. Syahriah, S. Sos (Pengawas Perpustakaan)
6. Hasma, S.I.Pust (Fungsional Pustakawan Ahli Pertama)

7. Yuliastri, A. Ma. Pust (Pengelola Bahan Pustaka Bidang Perpustakaan)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. H. Wirawan Jaya, SE, M.I.Kom (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
4. Darhan, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
5. Yammarnas, S.I.Pust (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
6. Nurhaedah Nar, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Pertama)
7. Roslina (Pengadministrasi Keuangan Subbagian Program dan Keuangan)

XXVII. Kantor Kecamatan Barru

Ketua Tim : Camat Barru

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Mila Karmila, A.Md (Pengelola Gaji)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Sub Bagian Umum

D. Rencana Kerja

1. Kepala Sub Bagian Program
2. Mahrung (Bendahara Keuangan)
3. Muhammad Yahya (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)

XXVIII. Kantor Kecamatan Tanete Rilau

Ketua Tim : Camat Tanete Rilau

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Tanete Rilau

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Tanete Rilau
2. Kepala Subbagian Umum Kantor Kecamatan Tanete Rilau

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Tanete Rilau
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Tanete Rilau

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Tanete Rilau
2. Kepala Subbagian Keuangan Kantor Kecamatan Tanete Rilau

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program Kantor Kecamatan Tanete Rilau
2. Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan Tanete Rilau

XXIX. Kantor Kecamatan Tanete Riaja

Ketua Tim : Camat Tanete Riaja

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Tanete Riaja

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan SDM

D. Rencana Kerja

1. Kepala Sub Bagian Program
2. Halikman, S.Sos (Bendahara Pengeluaran)

XXX. Kantor Kecamatan Pujananting

Ketua Tim : Camat Pujananting

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Pujananting

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- C. Tujuan dan Sasaran
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum
 - 2. Kepala Sub Bagian Program
- D. Rencana Kerja
 - 1. Sukur (Bagian Program)
 - 2. Surianah (Bendahara Pengeluaran)

XXXI. Kantor Kecamatan Balusu

Ketua Tim : Camat Balusu
Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Balusu
Kelompok Kerja :

- A. Evaluasi Kinerja
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balusu
 - 2. Kepala Sub bagian Umum Kecamatan Balusu
- B. Telaahan Kebijakan
 - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Balusu
 - 2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Balusu
- C. Tujuan dan Sasaran
 - 1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Balusu
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Balusu
- D. Rencana Kerja
 - 1. Kepala Sub Bagian Program Kecamatan Balusu
 - 2. Andi Tenri Ola (Pengadministrasian Keuangan)

XXXII. Kantor Kecamatan Soppeng Riaja

Ketua Tim : Camat Soppeng Riaja
Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Soppeng Riaja
Kelompok Kerja :

- A. Evaluasi Kinerja
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Soppeng Riaja
 - 2. Kepala Sub bagian Umum Kecamatan Soppeng Riaja
- B. Telaahan Kebijakan
 - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Soppeng Riaja

2. Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Soppeng Riaja

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Soppeng Riaja
2. Kepala Sub bagian Keuangan Kecamatan Soppeng Riaja

D. Rencana Kerja

1. Kepala Sub bagian Program Kecamatan Soppeng Riaja
2. Hamzah,S.A.P (Pengadministrasian Keuangan)

XXXIII. Kantor Kecamatan Mallusetasi

Ketua Tim : Camat Mallusetasi

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Mallusetasi

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Subbagian Umum

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Subbagian Keuangan Kantor Kecamatan Mallusetasi

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program Kantor Kecamatan Mallusetasi
2. Kepala Subbagian Keuangan Kantor Kecamatan Mallusetasi
3. Suparman (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

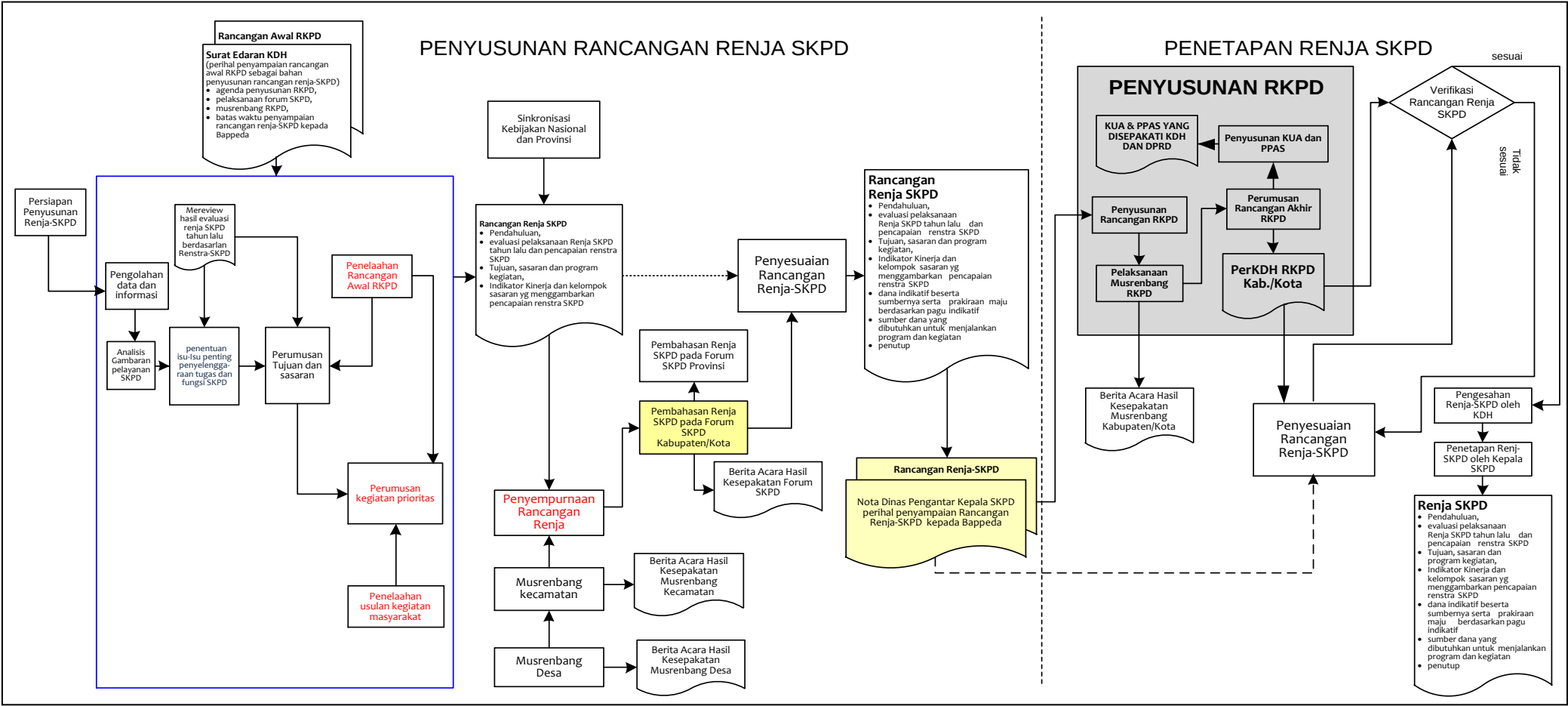
Perencanaan kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritis yang harus dijadikan focus perhatian oleh manajemen. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja sungguh merupakan isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi.

Perencanaan kinerja menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut sebagai Rencana Kerja (Renja). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Barru Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja pada Lingkup Bapperida Kabupaten Barru untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 melalui 6 (enam) tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan pertama adalah persiapan penyusunan Renja yang terdiri dari penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja kepada seluruh anggota tim, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. **Tahapan kedua** adalah penyusunan Rancangan Awal Renja yang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. **Tahapan ketiga** yaitu penyusunan rancangan Renja yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja dan selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. **Tahapan keempat** adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. **Tahapan kelima** adalah perumusan Rancangan Akhir Renja yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD. **Tahapan keenam** adalah penetapan Renja melalui Keputusan Bupati Barru paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Barru tentang RKPD Tahun 2026 ditetapkan. Tahapan penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Barru



Gambar I.2
Alur Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah
(Kedudukan Renja Perangkat Daerah dalam SPPN)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Barru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 59);
 22. Peraturan Bupati Barru Nomor 63 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 65);

23. Peraturan Bupati Barru Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 72);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 adalah untuk memberi gambaran akan bentuk kerja Bapperida Kabupaten Barru dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tujuannya adalah:

1. Menghubungkan perencanaan strategis dengan perencanaan operasional yang lebih rinci.
2. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran.
3. Memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja.
4. memudahkan manajemen dalam menetapkan target pada unit kerja.
5. Memudahkan dalam membuat spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan capaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja Bapperida Kabupaten Barru serta susunan garis besar isi dokumen, adalah:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri dari:

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, terdiri dari:

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra Perangkat Daerah, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Mengingat laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Bapperida belum disusun pada Tahun 2024, maka dibuat rekapitulasi hanya berdasarkan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Bappelitbangda. Rekapitulasi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Bapperida Kabupaten Barru tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
s/d Tahun 2024 Bapperida Kabupaten Barru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	1	3	3	100	3	3	100
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	140	27	26	26	100	25	78	55,71
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100	0	2	40
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	2	4	4	100	1	7	87,50

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	2	2	2	100	1	5	100
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	5	4	4	100	1	10	50
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	2	1	50	1	3	60
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	0	12	12	100	12	24	40
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	630	185	127	123	96,85	63	371	58,89
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	96,26	96,26	100	100	100
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	0	104	100	96	3	103	936,36
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	4	3	3	100	7	14	73,68
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	120	48	24	24	100	24	96	80
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100	24	60	100
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24	9	7	5	71,43	6	20	83,33
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	8	0	30	30	100	0	30	375
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	273	24	24	19	79,17	38	81	29,67
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	0	1	0	0	1	1	20

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100,00	100	81,82	81,82	100	100	100
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	Persen	100	100,00	100	100	100	100	100	100
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	7	3	1	1	100	2	6	85,71
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	2	1	1	100	2	5	83,33
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	2	2	2	100	2	6	85,71
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	44	15	11	11	100	11	37	84,09

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Persen	100	100,00	100	100	100	100	100	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	176	88	44	44	100	44	176	100
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	33	10	8	8	100	10	28	84,85
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	80	32	16	16	100	16	64	80

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Rekomendasi / Kajian / Laporan	256	96	48	48	100	60	204	79,69
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	132	48	24	24	100	36	108	81,82
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	60	24	12	12	100	12	48	80

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	44	16	8	8	100	12	36	81,82
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	20	8	4	4	100	4	16	80
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	Rekomendasi / Kajian / Laporan	96	36	18	18	100	24	78	81,25
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	44	16	8	8	100	12	36	81,82
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	20	8	4	4	100	4	16	80

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	22	8	4	4	100	6	18	81,82
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	10	4	2	2	100	2	8	80
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	Rekomendasi / Kajian / Laporan	176	66	33	33	100	44	143	81,25
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	44	16	8	8	100	12	36	81,82
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	20	8	4	4	100	4	16	80

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	77	28	14	14	100	21	63	81,82
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	35	14	7	7	100	7	28	80
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Poin	≥ 60	48,50	≥ 60,01	34,34	57	≥ 60,01	60,01	100
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	5	2	1	1	100	1	4	80

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	5	2	1	1	100	1	4	80
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	2	1	1	100	1	4	80

Adapun pencapaian kinerja pada tahun lalu yaitu tahun 2024 secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1.1.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 127 Laporan. Adapun realisasinya adalah 123 laporan dengan capaian sebesar 96,85%.

1.1.2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1.2.1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 24 Unit. Adapun realisasinya adalah 19 Unit dengan capaian sebesar 79,17%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 26 Orang/bulan. Adapun realisasinya adalah 26 Orang/bulan dengan capaian sebesar 100%.

2.1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket. Adapun realisasinya adalah 1 Paket dengan capaian sebesar 100%.

2.1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 24 laporan. Adapun realisasinya adalah 24 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.1.3.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Output sub

kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan. Adapun realisasinya adalah 12 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

2.2.1.1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Output sub

kegiatan adalah Jumlah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota sebanyak 2 Berita Acara. Adapun realisasinya adalah 2 Berita Acara dengan capaian sebesar 100%.

2.2.1.2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sebanyak 11 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 11 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi sebanyak 44 Orang. Adapun realisasinya adalah 44 Orang masukan dengan capaian sebesar 100%.

2.2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 8 Laporan. Adapun realisasinya adalah 8 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sebanyak 16 Laporan. Adapun realisasinya adalah 16 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

2.3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 24 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 24 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan sebanyak 12 Laporan. Adapun realisasinya adalah 12 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

(RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

2.3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

sebanyak 4 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 4 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA sebanyak 2 Laporan. Adapun realisasinya adalah 2 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2.3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 14 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 14 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada

Bidang Kewilayahan sebanyak 7 Laporan. Adapun realisasinya adalah 7 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

2.4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4.1.3. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi. Adapun realisasinya adalah 1 rekomendasi dengan capaian sebesar 100%.

2.4.1.4. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4.2. **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

2.4.2.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah:

1. Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah dalam bentuk perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang dipengaruhi oleh undangan pihak terkait yang berasal dari kementerian, pemerintah provinsi atau daerah lainnya.
2. Kegiatan Pemeliharaan merupakan kegiatan yang hanya digunakan apabila terdapat barang milik daerah yang memerlukan tindakan untuk menjaga atau memperbaiki kendaraan operasional, mebel, gedung, peralatan dan mesin kantor lainnya sehingga kondisinya tetap layak dipakai.

4.2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Beberapa faktor penyebab terpenuhinya pemenuhan target kinerja adalah:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan berbasis pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
3. Komitmen pengguna anggaran dalam menjaga konsistensi program yang ada pada RKPD sepenuhnya berpedoman kepada RPJMD, dan program yang ada pada APBD sepenuhnya berpedoman kepada RKPD
4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengawal kegiatan agar tetap on the track dan dapat dijadikan langkah deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan
5. Optimalnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan
6. Optimalnya peran APIP dalam melakukan pengawasan penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui reviu dokumen perencanaan dan penganggaran

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan indikator Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2024 realisasi adalah LEVEL 3 telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan yaitu LEVEL 3. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah adalah LEVEL 3 berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang

sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

- b) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH dengan indikator Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu pada tahun 2023 realisasi sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.
- c) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dengan indikator Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan pada tahun 2023 realisasi sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.
- d) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dengan indikator Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023 realisasi sebesar 48,50 Poin tidak sesuai dengan target Renstra tahun berjalan yaitu 60,01 Poin. Meskipun berdasarkan perbandingan ini realisasi tidak sesuai dengan target, proyeksi target yang akan digunakan pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta

tahun selanjutnya tetap menggunakan proyeksi sesuai arah Renstra untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a) Membuat rencana operasional tahunan meliputi perumusan: (1) input atau sumberdaya yang akan dibutuhkan; (2) aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan; (3) volume output yang akan dihasilkan, serta (4) hasil (outcomes) sebagai indikator keberhasilan program/kegiatan. Akurasi perencanaan kinerja sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran karena perencanaan yang baik kemungkinan besar akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan.
- b) Melakukan administrasi kinerja dengan baik yang akan diperlukan dalam pelaporan kinerja. Selain itu, setiap tantangan dan hambatan perlu didokumentasikan dengan tertib guna pembelajaran organisasi ke depan. Disamping itu, dokumen-dokumen kinerja dimaksud juga merupakan informasi yang penting dalam pengukuran kinerja organisasi.
- c) Melakukan pengukuran kinerja. untuk menilai apakah sumberdaya input yang disediakan telah terpakai secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah semua elemen organisasi (input, proses, output) telah berfungsi secara optimal untuk menghasilkan outcomes. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah target kinerja indikator kinerja utama telah tercapai sesuai dengan rencana kerja tahunan.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Monitoring program/kegiatan dilakukan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan anggaran sebagai upaya tindakan preventif dalam mencegah kegagalan dan menilai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Sedangkan evaluasi

program/kegiatan dilakukan untuk menilai sejauh mana program/kegiatan pemerintah telah berhasil mencapai tujuannya dan apakah hasil dimaksud telah memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi tujuan organisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Menganalisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru digunakan Indikator Kinerja berdasarkan target Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026. Penilaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dilakukan terhadap indikator sasaran dengan mengukur target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya berdasarkan kondisi target menurut Renstra Bappelitbangda dan perkiraan tahun berjalan, menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Bappelitbangda.

Mengingat pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

Rekapitulasi hasil pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024 (thn n-2)	2025 (thn n-1)	2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	2024 (thn n-2)	2025 (thn n-1)	2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perencanaan Pembangunan											
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	IKK	IKK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	IKK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	IKK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	-	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024 (thn n-2)	2025 (thn n-1)	2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	2024 (thn n-2)	2025 (thn n-1)	2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		IKU	100 Poin	100 Poin	-	-	95,261 Poin	97,778 Poin	-	-	Proyeksi sesuai arah Renstra
4	Penelitian dan Pengembangan											
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	IKK / IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	IKK / IKU	100	100%	100%	100%	66,67%	57,14%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra

Indikator sasaran yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebanyak 10 indikator kinerja, yang terdiri dari enam indikator bidang urusan Perencanaan Pembangunan dan empat indikator bidang urusan Penelitian dan Pengembangan. Secara umum realisasi indikator sasaran yang telah dicapai sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target. Rinciannya adalah terdapat dua indikator yang capaiannya dibawah target kinerja yang direncanakan dan delapan indikator yang memenuhi atau sama dengan target kinerja yang direncanakan.

Analisis kinerja kesepuluh indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (IK 1.1, 1.2, 1.3). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen dengan capaian sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun sampai dengan tahun 2024 adalah:
 - 1) Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 23)
 - 2) Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 31)
 - 3) Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 22) tanggal 28 Juni 2021
 - 4) Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 25) tanggal 16 Agustus 2021
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021) Tanggal 20 Agustus 2021

- 6) Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 35)
- 7) Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 41);
- 8) Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 10);
- 9) Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 11); dan
- 10) Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4);
- 11) Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 10);
- 12) Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3).

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (IK 1.4). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dengan RPJMD yaitu Program yang ada pada RPJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD.

3. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (IK 1.5). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD yaitu program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

4. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IK 1.6). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100 Poin dan realisasi sebesar 97,778 Poin dengan capaian sebesar 97,79%.

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022 memperlihatkan indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” mengalami peningkatan dimana pada tahun pada tahun 2024 peningkatan sebanyak 2,517 Poin dibandingkan pada tahun 2023. Meskipun realisasi kinerja serta capaian kinerja mengalami peningkatan, akan tetapi realisasi memperlihatkan kurang dari target.

Realisasi yang rendah terdapat pada Dimensi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (D.2). rendahnya pencapaian ini disebabkan karena kemampuan keuangan

daerah serta analisis pencapaian target kinerja kegiatan yang menunjukkan beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara parallel untuk mencapai target indicator. Solusi untuk mengatasi penyebab masalah dalam diperlukan analisis lebih dalam terkait usulan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah serta identifikasi kegiatan yang beririsan dari sisi indicator untuk efisiensi anggaran. Sementara itu pada Dimensi Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1) telah sesuai target. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target adalah terpenuhinya Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD merupakan konsistensi yang terbangun dalam Tim Penyusun RKPD serta hasil evaluasi Dokumen RKPD dari Bappelitbangda Provinsi sangat menentukan terpenuhinya keselarasan sasaran program antara RKPD dan RPJMD. Selanjutnya, diperlukan keberlanjutan terhadap konsistensi perencanaan serta memaksimalkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan RKPD. Demikian halnya pada Dimensi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (D.3) telah sesuai target. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target adalah:

1. Sinergitas perencanaan kabupaten dengan provinsi sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian sasaran Program Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, diperlukan dukungan pendanaan lebih dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pencapaian target sasaran pemerintah provinsi di Kabupaten Barru
2. Sinergitas perencanaan kabupaten dengan pusat sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian sasaran Program Nasional. Selanjutnya, diperlukan dukungan pendanaan lebih dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Barru untuk pencapaian target sasaran Prioritas Nasional
5. Persentase implementasi rencana kelitbangan (IK 2.1). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Target Indikator Kinerja “Persentase implementasi rencana kelitbangan” terealisasi 100% dipengaruhi oleh terdapat dua jumlah kelitbangan dalam dokumen RKPD sesuai dengan perencanaan kelitbangan dalam dokumen RPJMD.

6. Target Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (IK 2.2). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” memiliki realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh telah diintegrasikannya seluruh dokumen kelitbangan ke dalam perencanaan daerah

7. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (IK 2.3). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah” sesuai dengan target yang ditetapkan dipengaruhi oleh telah dilakukannya kegiatan sosialisasi, diseminasi dan coaching clinic bagi pelaku inovasi di perangkat daerah. Hal ini meningkatkan pemahaman sumber daya manusia pada perangkat daerah terhadap inovasi daerah.

8. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (IK 2.4). Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sebesar 57,14% dengan capaian sebesar 57,14%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” tidak sesuai dari target yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 34,34 dan berada pada kategori Kabupaten Kurang Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2023 menurun sebesar 14,16 poin. Turunnya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor struktural, sistemik, dan kebijakan yang saling terkait. Untuk memperbaiki penurunan nilai tersebut, perlu ada perubahan yang mendalam dalam kebijakan, penguatan ekosistem inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Barru

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Data perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern.

Meskipun Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan menciptakan data berkualitas dan mudah diakses, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan pemahaman tentang SDI, dan belum optimalnya pemanfaatan data yang tersedia. SDI berfungsi sebagai mengatur pertukaran data dan memastikan data dapat berperan optimal. Kunci pemanfaatan data ada 3, yaitu: (1) Data tersedia dengan akurat, SDI memastikan saat ini data di portal data.go.id sebanyak 375.000 dataset yang terdiri dari data seluruh kementerian/lembaga, provinsi sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia. (2) Adanya *Digital Talent*, serta (3) *Infrastructure* yang tersedia.

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan baik antar waktu, antarruang, antar fungsi belum optimal.

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, baik antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi, merupakan hal yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Koordinasi dan sinkronisasi ini memastikan bahwa berbagai rencana pembangunan yang dibuat oleh berbagai pihak (antar waktu, antar wilayah, dan antar sektor) saling terkait, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan koordinasi dan sinkronisasi yang baik, perencanaan pembangunan daerah akan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan akan lebih terarah, tidak terjadi pemborosan sumber daya, dan potensi konflik antar sektor maupun antar wilayah dapat diminimalisir. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga akan meningkat, karena mereka merasa dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan

3. Rendahnya budaya inovasi bagi ASN terutama dalam konteks pelayanan publik

Sebagai tindak lanjut, para ASN secara proaktif menciptakan ide-ide baru dan menerapkan pembaruan dalam pekerjaan mereka untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemecahan masalah dengan cara kreatif, pemanfaatan teknologi, hingga mendorong budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappelitbangda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappelitbangda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025. Review meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Bappelitbangda.

Rekapitulasi hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 untuk program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Bapperida Kabupaten Barru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	622.786.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	254.519.900	
			Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%		
								3. Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD	86%		
1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				452.135.700	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				198.949.100	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Barru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	20.548.400	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Barru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	10.674.200	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	37.724.400	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	19.432.200	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	59.136.200	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	31.068.100	

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	334.726.700	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	137.774.600	
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				10.411.500	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				7.775.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	10.411.500	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Barru	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	44 Orang	7.775.000	
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				160.238.800	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				47.795.800	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	9.546.600	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5.175.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	150.692.200	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	42.620.200	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan		523.769.100	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional	100%	310.197.600	
									100%		
2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				230.306.700	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				145.549.200	

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36 Dokumen	49.701.300	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	21.416.800	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	73.047.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	55.300.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	30.703.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	15.431.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	76.854.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	53.401.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				122.973.200	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				66.821.200	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	32.777.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	14.614.500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	30.429.700	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	16.670.200	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	32.665.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	17.568.100	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	27.100.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	17.968.400	

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Bidang SDA					Daerah Bidang SDA					
2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				170.489.200	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				97.827.200	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	65.729.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	37.538.100	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	71.281.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	43.560.500	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	15.121.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	8.871.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	18.357.100	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7.857.100	
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				178.749.100	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100%	298.332.600	
								2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan			
3.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				106.572.700	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				47.435.700	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	52.522.900	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	34.910.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	54.049.800	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	12.524.800	
3.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				200.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Barru	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0 Dokumen	0	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Barru	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				72.176.400	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				50.896.900	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	72.176.400	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	50.896.900	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.103.387.782	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	3.356.646.950	
			Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan	20 JPL							

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendidikan dan Pelatihan								
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0					1.250.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0		Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Barru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0		Barru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Barru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0		Barru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Barru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0		Barru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	250.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0		Barru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	250.000	

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.831.333.442	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.057.551.510	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.831.333.442	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	3.057.051.510	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Barru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Barru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	250.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Barru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Barru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000	
4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				750.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	250.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	250.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.622.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.250.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Barru	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	0		Barru	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	250.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Barru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	12.622.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Barru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	9.000.000,00	
4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.225.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				146.519.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.033.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.405.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.405.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.396.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.396.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Barru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.550.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Barru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.550.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.140.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.140.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.468.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.468.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	110.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan	117.525.600	
4.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.276.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.833.500	
	Pengadaan Mebel	Barru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	11.463.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	20.370.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	70.813.100	Pengadaan Mebel	Barru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	11.463.500	
4.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru			0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	56.863.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.929.440	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.629.440	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	18.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	32.150.000	
	Pemeliharaan Mebel	Barru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Barru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	15.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	15.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.679.440	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.929.440	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan adalah Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan tahun 2025, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2026 yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Bappelitbangda Kabupaten Barru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam mendukung kebijakan perencanaan nasional Tahun 2027, Bapperida Kabupaten Barru sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan memiliki tugas pokok sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, think-tank, koordinator dan administrator di daerah. Dukungan tersebut berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 melalui pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Bapperida Kabupaten Barru berperan menjamin sinergitas perencanaan di daerah dengan yang ada di pusat untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang ditentukan khususnya pada program prioritas sesuai urusan pemerintahan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bapperida sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Barru dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun

visi dan misi Bapperida yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2025-2029.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah (T1)

Indikator Tujuan : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

IPPD adalah instrument untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian IPPD adalah:

- a. Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar dapat mewujudkan tujuan bersama. Komponen penilaian dari sinergi terdiri dari:
 - 1) Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN;
 - 2) Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP; dan
 - 3) Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap PN di Daerah.
- b. Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis target - Program/Kegiatan di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:
 - 1) Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah;
 - 2) Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah;
 - 3) Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek untuk mencapai target dan sasaran; dan
 - 4) Inovasi perencanaan pembangunan
- c. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu)

sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (S1)

Indikator Sasaran 1.1 : Nilai komponen perencanaan kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP Kabupaten

Indikator Sasaran 1.2 : Nilai komponen pengukuran kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP Kabupaten

- Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten mengacu pada penilaian terhadap perencanaan kinerja instansi pemerintah, yang mencakup 1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, 2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disertai level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), dan 3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- Nilai Pengukuran Kinerja dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja instansi pemerintah, yang mencakup 1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang, dan 3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (S2)

Indikator Sasaran 2.1 : Indeks Inovasi Daerah

- Indeks Inovasi Daerah adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah

yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modelling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

- Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, dengan kategori Sangat Inovatif (skor 60,01-100 Poin), Inovatif (skor 35,00-60,00 Poin), Kurang Inovatif (skor 0,01-34,99 Poin) dan Tidak Dapat Dinilai (skor 0 Poin).

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (S3)

Indikator Sasaran 3.1 : Nilai SAKIP

- Nilai SAKIP perangkat daerah adalah penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat perangkat daerah, yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Penilaian ini menghasilkan predikat atau nilai akuntabilitas kinerja, seperti AA, A, BB, B, dan seterusnya, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kinerja serta relevansinya dengan pencapaian prioritas pembangunan
- Hasil evaluasi SAKIP dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai predikat yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dengan kategori predikat AA (nilai > 90 – 100) ; A (nilai > 80 – 90) ; BB (nilai > 70 – 80) ; B (nilai > 60 – 70) ; CC (nilai > 50 – 60) ; C (nilai 30 – 50) ; D (nilai > 0 – 30)
- Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja oleh Inspektorat Kabupaten

Kesesuaian antara sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dengan tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.25.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH											
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	0	86	87	88	89	90	91	
Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Poin)	23.04	23.50	24.00	24.50	25.00	26.00	27.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
yang bernafaskan keagamaan											
			Nilai Pengukuran Kinerja pada Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Poin)	15.92	16.50	17.00	17.92	18.71	19.00	19.29	
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	34.34	39,52	44,70	49,89	55,07	60,25	65.43	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai SAKIP (Poin)	65,16	67,13	69,10	71,06	73,03	75	78.04	

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Barru dalam pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang dirancang Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) program, 16 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.330.703.242,-. Adapun rumusan program dan kegiatan serta dengan sasarannya disajikan dalam table berikut.

Tabel III.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Bapperida Kabupaten Barru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.330.703.242				4.193.588.846
					PERENCANAAN PEMBAGUNAN				4.032.370.642				4.094.764.583
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah		3 Poin	3.467.653.142			3 Poin	3.325.817.147
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Barru	2 Dokumen	250.000	DAU		3 Dokumen	250.000
5	01	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Barru	2 Dokumen	250.000	DAU		2 Dokumen	250.000
5	01	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Barru	2 Dokumen	250.000	DAU		2 Dokumen	250.000

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Barru	1 Laporan	250.000	DAU		1 Laporan	250.000
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Barru	4 Laporan	250.000	DAU		4 Laporan	250.000
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	31 Orang	3.057.051.510	DAU		31 Orang	3.057.051.510
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Barru	18 Laporan	250.000	DAU		18 Laporan	250.000
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Barru	1 Dokumen	250.000	DAU		1 Dokumen	250.000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barru	2 Dokumen	250.000	DAU		2 Dokumen	250.000
5	01	01	2,03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	4 Laporan	250.000	DAU		4 Laporan	250.000
5	01	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	1 Laporan	250.000	DAU		1 Laporan	250.000
5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5	01	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Barru	5 Dokumen	250.000	DAU		5 Dokumen	250.000
5	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	3 Orang	9.000.000,00	DAU		2 Orang	3.000.000,00
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	2.033.000	DAU		1 Paket	2.033.000

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	9.405.900	DAU		1 Paket	9.405.900
5	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	2 Paket	4.396.900	DAU		2 Paket	4.396.900
5	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	8.550.000	DAU		1 Paket	8.550.000
5	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	1 Paket	1.140.000	DAU		1 Paket	1.140.000
5	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	12 Laporan	3.468.000	DAU		12 Laporan	3.468.000
5	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	122 Laporan	117.525.600	DAU		48 Laporan	44.284.455
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	1 Unit	20.370.000	DAU		1 Unit	20.370.000

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	3 Unit	11.463.500	DAU		2 Unit	2.583.933
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	5 Unit	56.863.100	DAU		2 Unit	3.147.817
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	24 Laporan	52.206.192	DAU		24 Laporan	52.206.192
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	12 Laporan	58.800.000	DAU		12 Laporan	58.800.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	7 Unit	32.150.000	DAU		7 Unit	32.150.000
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barru	5 Unit	1.500.000	DAU		5 Unit	1.500.000

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	33 Unit	15.050.000	DAU		33 Unit	15.050.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	1 Unit	3.929.440	DAU		1 Unit	3.929.440
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%	254.519.900			100%	457.198.848
						2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100%				100%	
						3. Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD		86%				87%	
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			198.949.100				401.350.194
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Barru	1 Berita Acara	10.674.200	DAU		2 Berita Acara	19.945.884
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	1 Berita Acara	19.432.200	DAU		2 Berita Acara	37.293.644

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	1 Berita Acara	31.068.100	DAU		2 Berita Acara	59.525.562
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Barru	7 Dokumen	137.774.600	DAU		11 Dokumen	284.585.104
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				7.775.000				7.813.875
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Barru	44 Orang	7.775.000	DAU		44 Orang	7.813.875
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				47.795.800				48.034.779
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Barru	5 Laporan	5.175.600	DAU		10 Laporan	5.201.478

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Barru	16 Laporan	42.620.200	DAU		16 Laporan	42.833.301
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	310.197.600			100%	311.748.588
						2. Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional		100%				100%	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				145.549.200				146.066.196
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	24 Dokumen	21.416.800	DAU		36 Dokumen	21.546.049

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Barru	12 Laporan	55.300.000	DAU		12 Laporan	55.429.249
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Barru	8 Dokumen	15.431.000	DAU		12 Dokumen	15.560.249
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Barru	4 Laporan	53.401.400	DAU		4 Laporan	53.530.649
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				66.821.200				67.338.196
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Barru	8 Dokumen	14.614.500	DAU		12 Dokumen	14.743.749

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Barru	4 Laporan	16.670.200	DAU		4 Laporan	16.799.449
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	6 Dokumen	17.568.100	DAU		9 Dokumen	17.697.349
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Barru	3 Laporan	17.968.400	DAU		3 Laporan	18.097.649
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				97.827.200				98.344.196
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	8 Dokumen	37.538.100	DAU		12 Dokumen	37.667.349

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Barru	4 Laporan	43.560.500	DAU		4 Laporan	43.689.749
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Barru	14 Dokumen	8.871.500	DAU		21 Dokumen	9.000.749
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Barru	7 Laporan	7.857.100	DAU		7 Laporan	7.986.349
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				298.332.600				98.824.263
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		100%	298.332.600			100%	98.824.263
						2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan		100%				100%	

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	1 Laporan	34.910.900	DAU		1 Laporan	35.074.787
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	1 Laporan	12.524.800	DAU		1 Laporan	12.688.688
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Barru	1 Dokumen	200.000.000	DAU		0 Dokumen	0
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	1 Laporan	50.896.900	DAU		1 Laporan	51.060.788

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 terumus dalam 4 (empat) program, 16 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.330.703.242,-. Program dan kegiatan tersebut berpedoman pada RKPD Kabupaten Barru tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang tugas pokok dan tupoksi Bapperida Kabupaten Barru sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan. Sementara itu, alokasi anggaran yang digunakan dalam rencana kerja adalah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya berdasarkan pagu indikatif yang telah disesuaikan dengan beban kinerja terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Program, kegiatan dan subkegiatan dimaksud adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.2.3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- 1.3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2. Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - 2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - 2.1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2.1.4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - 2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- 3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- 4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - 4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 4.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
 - 4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 4.2.1. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

4.3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

4.3.1. Penelitiandan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

4.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

4.4.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Rencana kerja dan pendanaan Bapperida Kabupaten Barru tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 Bapperida Kabupaten Barru

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.330.703.242		
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	3.467.653.142		
1.1	5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.1.1	5	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000	Barru	DAU
1.1.2	5	01	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	250.000	Barru	DAU
1.1.3	5	01	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	250.000	Barru	DAU

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
1.1.4	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	250.000	Barru	DAU
1.1.5	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	250.000	Barru	DAU
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.2	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	3.057.051.510	Barru	DAU
1.2.1	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	250.000	Barru	DAU

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
1.2.2	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000	Barru	DAU
1.3	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1.3.1	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	250.000	Barru	DAU
1.3.2	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	250.000	Barru	DAU
1.3.3	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	250.000	Barru	DAU
1.4	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1.4.1	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	250.000	Barru	DAU

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
1.4.2	5	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	9.000.000,00	Barru	DAU
1.5	5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.5.1	5	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.033.000	Barru	DAU
1.5.2	5	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.405.900	Barru	DAU
1.5.3	5	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.396.900	Barru	DAU
1.5.4	5	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.550.000	Barru	DAU
1.5.5	5	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.140.000	Barru	DAU
1.5.6	5	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.468.000	Barru	DAU

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
1.5.7	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan	117.525.600	Barru	DAU
1.6	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.6.1	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	20.370.000	Barru	DAU
1.6.2	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	11.463.500	Barru	DAU
1.6.3	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	56.863.100	Barru	DAU
1.7	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.7.1	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192	Barru	DAU
1.7.2	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.800.000	Barru	DAU

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
1.8	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.8.1	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	32.150.000	Barru	DAU
1.8.2	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.500.000	Barru	DAU
1.8.3	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	15.050.000	Barru	DAU
1.8.4	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.929.440	Barru	DAU
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	254.519.900		
							2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%			

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
							3. Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD	86%			
2.1	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			198.949.100		
2.1.1	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	10.674.200	Barru	DAU
2.1.2	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	19.432.200	Barru	DAU
2.1.3	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	31.068.100	Barru	DAU
2.1.4	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	137.774.600	Barru	DAU
2.2	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			7.775.000		

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
2.2.1	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	44 Orang	7.775.000	Barru	DAU
2.3	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			47.795.800		
2.3.1	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5.175.600	Barru	DAU
2.3.2	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	42.620.200	Barru	DAU
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	310.197.600		

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
							2. Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional	100%			
3.1	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			145.549.200		
3.1.1	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	21.416.800	Barru	DAU
3.1.2	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	55.300.000	Barru	DAU
3.1.3	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	15.431.000	Barru	DAU
3.1.4	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	53.401.400	Barru	DAU

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
3.2	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			66.821.200		
3.2.1	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	14.614.500	Barru	DAU
3.2.2	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	16.670.200	Barru	DAU
3.2.3	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	17.568.100	Barru	DAU
3.2.4	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	17.968.400	Barru	DAU
3.3	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			97.827.200		

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
3.3.1	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	37.538.100	Barru	DAU
3.3.2	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	43.560.500	Barru	DAU
3.3.3	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	8.871.500	Barru	DAU
3.3.4	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7.857.100	Barru	DAU
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100%	298.332.600		

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
							2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100%			
4.1	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
4.1.1	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	34.910.900	Barru	DAU
4.1.2	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	12.524.800	Barru	DAU
4.2	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					

Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026

NO	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2					3	4	5	6	7	8
4.2.1	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200.000.000	Barru	DAU
4.3.	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
4.3.1	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	50.896.900	Barru	DAU

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

- a. Perumusan Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029.
- b. Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- c. Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 berpedoman kepada Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 yang penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yaitu tahun anggaran 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- b. Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan telah dilakukan pemuktahiran melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan

nomenklatur selanjutnya dilakukan penginputan pada aplikasi SIPD-RI.

- c. Renja Bapperida Kabupaten Barru Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Bapperida dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Tahun 2026.
- d. Apabila terjadi rasionalisasi anggaran yang diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan daerah yang menyebabkan ketidaksusuaian perencanaan kinerja dengan anggaran maka akan dilakukan penyesuaian terhadap selisih anggaran yang ada dengan cara memfokuskan anggaran pada kegiatan yang memiliki urgensi langsung dengan pencapaian target Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Bapperida. Sementara itu, untuk kegiatan yang termasuk penunjang urusan akan dilakukan pengurangan pada target kinerja yang berimplikasi pada pengurangan anggaran. Target kinerja yang telah dikurangi akan direalokasi pada perubahan anggaran tahun 2026 atau pada perencanaan tahun 2027 untuk memenuhi pencapaian target kegiatan periode akhir perencanaan jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.
- e. Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulan, semesteran dan tahunan atas pelaksanaan Renja Tahun 2026 dalam rangka pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efektif dan efisien.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2026, dimungkinkan terjadi perubahan Renja apabila terjadi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- b. Perubahan-perubahan yang terjadi akan dirumuskan dalam Perubahan Renja Bapperida Tahun 2026.
- c. Renja Bapperida Tahun 2026 menjadi pedoman kerja bagi seluruh ASN lingkup Bapperida Kabupaten Barru sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada core value BerAKHLAK dan senantiasa berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja.

Barru, 29 Agustus 2025

Plt. KEPALA BADAN,



Dr. S. RIFATULLAH AKIL, S.STP., M.M M

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 198507012003121001

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.